

Pembentukan Balkon sebagai Upaya Penguatan Nilai Musyawarah dan Nilai Sosial di Desa Cidenok Kabupaten Majalengka

Jaki Yudin¹, Elis Siti Solihah², Asep Romdani³, Nadi Sutisna⁴, Ratna Nurul Fauziyah⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, STKIP Yasika Majalengka, Indonesia

Corresponding Author

Nama Penulis: Jaki Yudin

E-mail: jakiyudin@stkipyasika.ac.id

Abstrak

Minimnya partisipasi masyarakat dan tidak tersedianya wadah aspirasi menjadi faktor kurang maksimalnya pembangunan desa yang sesuai kebutuhan. Untuk itu dibutuhkan kesadaran masyarakat dan media untuk menyalurkan aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah desa. Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah pembentukan Balai Konsultasi (Balkon). Pembentukan Balkon dilakukan dengan metode Asset-Based Community Development (ABCD) yang memuat langkah inkulturasi, discovery, design, define, dan reflection dengan teknik SLC. Langkah metode tersebut diwujudkan ke dalam tiga tahap pembentukan Balkon yakni tahap persiapan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi. Hal tersebut dilakukan untuk menciptakan kerja sama yang terarah melalui penguatan nilai-nilai musyawarah dan sosial. Penguatan tersebut dapat dikembangkan melalui pembentukan dan kegiatan Balai Konsultasi (Balkon) di Desa Cidenok. Dengan adanya Balai Konsultasi (Balkon) ini diharapkan masyarakat bisa lebih terbuka menyampaikan ide dengan cara musyawarah dan bersosialisasi tentang problematika yang dihadapi untuk mendukung keberlangsungan hidup mereka di Desa Cidenok.

Kata kunci – Musyawarah, Balai Konsultasi, Desa Cidenok.

Abstract

The lack of community participation and the unavailability of aspirational forums are factors that are not optimal in village development according to needs. For this reason, community and media awareness is needed to channel the aspirations of the community to the village government. One effort to overcome these problems is the establishment of a Consultation Center (Balcony). Balcony formation is carried out using the Asset-Based Community Development (ABCD) method which includes inculturation, discovery, design, define, and reflection steps with the SLC technique. The method steps are embodied in three stages of Balcony formation, namely the preparation, implementation, and monitoring and evaluation stages. This is done to create directed cooperation through strengthening deliberative and social values. This strengthening can be developed through the establishment and activities of the Consultation Center (Balcony) in Cidenok Village. With this Consultation Center (Balcony), it is hoped that the community can be more open in expressing ideas by means of deliberations and socializing about the problems they face to support their survival in Cidenok Village.

Keywords - Deliberation, Consultation Hall, Cidenok Village.

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial artinya manusia sebagai warga masyarakat, kesadaran manusia sebagai makhluk sosial akan memberikan rasa tanggung jawab untuk mengayomi individu yang lebih “lemah”. Setiap individu tidak dapat mengandalkan dirinya sendiri karena kekurangan yang ada pada setiap manusia. Maka dari itu, interaksi dengan individu lain dan kerja sama antara satu individu dan individu lain menjadi solusi bagi masyarakat untuk memecahkan permasalahan yang ada. Dalam bermasyarakat, setiap individu atau warga negara harus memperhatikan norma-norma yang berlaku. Sejalan dengan itu, setiap individu warga negara merupakan makhluk sosial yang termasuk pada zoon politicon dan tidak dapat hidup sendiri, dalam hidupnya manusia saling berhubungan satu sama lain yang tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh orang lain dan dikodratkan unntuk hidup bermasyarakat serta berhubungan dengan orang lain (Amirulloh, 2020). Dengan demikian, hubungan antara warga dengan pemerintah desa harus saling mendukung satu sama lain agar keberhasilan program kerja desa dapat tercapai.

Dalam praktiknya, kolaborasi antara warga dengan pemerintah desa kerap kali menemui kendala. Salah satunya tidak tersedianya jalur komunikasi yang menghubungkan masyarakat dengan pemerintah desa. Padahal, kemajuan desa dikembangkan secara berkala melalui berbagai cara salah satunya dengan pemberdayaan masyarakat yang bekerjasama dengan pemerintah di semua bidang dan wilayah. Oleh sebab itu, dibutuhkan media sebagai jalan aspirasi, keluhan, masukan dari masyarakat agar sampai kepada pemerintah desa. Hal itu menjadi penting supaya terjadi keselarasan antara kebutuhan masyarakat dengan program kerja pemerintah desa dengan adanya wadah aspirasi yang bermuara pada tindak lanjut dari pemerintah desa. Dengan begitu, akan terjadi satu pemahaman antara masyarakat dan pemerintah desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Hal ini sejalan dengan mandat UU Nomor 6 tahun 2014 yang menjelaskan bahwa tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Dalam mewujudkan kemajuan desa, diperlukan adanya kesadaran masyarakat desa untuk mendukung terselenggaranya program kerja desa tersebut. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosial sebagai upaya pembangunan desa menjadi hal yang sering terjadi. Padahal, partisipasi masyarakat penting dilakukan karena hasilnya akan dirasakan oleh masyarakat pula. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Irene (dalam Rompas, et. al. 2019) bahwa partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong pada pencapaian tujuan kelompok dan ikut bertanggung jawab terhadap kelompoknya. Hal tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pada dasarnya, tindak partisipatif merupakan hak setiap warga negara yang dapat berupa peran aktif masyarakat dalam tata kelola pemerintahan desa. Seyogianya, masyarakat dapat terlibat dalam pengambilan keputusan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Namun, hal itu tidak terjadi pada masyarakat Desa Cidenok. Hal ini seolah mewakili hasil observasi Rachaju, et al. (2022) yang menjelaskan minimnya partisipasi warga terhadap pembangunan desa di antaranya: partisipasi pengambilan keputusan dalam pembangunan desa, partisipasi pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan desa, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan desa, pemanfaatan hasil pembangunan dalam pembangunan desa.

Ruang besar yang mengakomodasi program pemerintah desa salah satunya terdapat pada musyawarah desa. Hal tersebut karena pemerintah desa memerlukan kerjasama dan dukungan dari masyarakat untuk membuat sebuah perubahan dan pembangunan desa secara berkelanjutan. Dengan harapan masyarakat dapat berkontribusi melalui penyampaian aspirasi untuk perbaikan dan kemajuan desa. Dukungan sosial merupakan informasi, umpan balik dari orang lain yang menunjukkan bahwa seseorang dicintai, diperhatikan, dihargai, dihormati dan dilibatkan dalam

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

jaringan komunikasi. Oleh sebab itu, pelibatan atau dukungan sosial amat diperlukan melalui musyawarah yang bertujuan untuk membantu pelaksanaan tugas fungsi pemerintah desa untuk meningkatkan pelayanan dan kenyamanan bagi masyarakat, sekaligus mempererat jalinan silaturahmi antarwarga masyarakat dengan pemerintah desa (Huri, et al. 2022; Darudin, 2022).

Musyawarah dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah desa sangat penting. Melalui musyawarah, pelibatan masyarakat bisa menjadi bahan pertimbangan sekaligus bahan masukan sebagai dukungan pembangunan desa. Akan tetapi, kegiatan musyawarah masih jarang dilakukan oleh masyarakat Desa Cidenok. Oleh karena itu, perlu penanaman kesadaran akan pentingnya peran serta masyarakat dalam upaya penguatan nilai-nilai musyawarah dalam mendukung keberlangsungan pembangunan desa. Kebebasan dalam bermusyawarah dapat diartikan dengan bebas berpendapat, berdiskusi, pengakuan, dan berpegang pada nilai-nilai kebenaran (Surani, 2017). Nilai kebebasan harus didasari dengan niat tulus tanpa paksaan dari orang lain. Pendapat yang diberikan wajib masuk akal, tidak menyinggung perasaan orang lain, dan sesuai norma. Untuk mewujudkannya diperlukan wadah yang mampu mengedukasi, membatasi, menentukan, dan menyampaikan pendapat masyarakat dalam musyawarah demi kepentingan pembangunan desa.

Masalah lain yang perlu menjadi perhatian yaitu ketidakberanian masyarakat untuk berkomunikasi atau menyampaikan gagasan kepada pemerintah desa. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara kami di Desa Cidenok, hal itu terjadi karena tiga faktor: pertama masyarakat itu sendiri tidak memiliki sikap empati terhadap desanya sehingga memilih untuk diam. Kedua, masyarakat cenderung melakukan hal yang sekiranya menguntungkan dirinya sendiri, sehingga masyarakat tidak memiliki kemauan atau kesadaran agar bisa menyampaikan aspirasinya. Ketiga, ketidakberanian masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya karena pemerintah desa tidak membuka peluang bagi masyarakat yang hendak menyalurkan aspirasinya. Semestinya pemerintah desa dapat memahami karakter dan kebutuhan masyarakatnya agar aspirasi mereka dapat ditampung dan ditindaklanjuti dengan baik. Hal ini sesuai mandat dalam UU Desa pasal 68 ayat 1 yang menyebutkan secara jelas hak masyarakat desa yaitu menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan kemasyarakatan desa.

Masyarakat Desa Cidenok juga kurang memiliki rasa terlibat untuk dukungan kelompok sosialnya. Pertama, terlihat ketika pemerintah desa dengan DKM Masjid As-Salam mengadakan kegiatan pengajian kliwonan yang hanya dihadiri oleh beberapa orang dari perwakilan blok saja. Kedua, pada saat kegiatan Jumsih atau jumat bersih tidak berjalan secara optimal karena minimnya partisipasi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya nilai sosial yang melekat dalam masyarakat Desa Cidenok sebab nilai sosial merupakan nilai-nilai yang berhubungan dengan sesama. Nilai tersebut berkaitan dengan sikap sadar, hak dan kewajiban diri seseorang dan orang lain, patuh pada aturan sosial, menghargai karya dan prestasi orang lain, dan sopan santun (Dhien, et al. 2022).

Rasa kebersamaan hidup dalam lingkungan yang sama belum tercurahkan dalam aksi nyata. Hal itu perlu penanaman dan penguatan nilai sosial dalam diri masyarakat lewat kepedulian sosial. Menurut Adler, kepedulian sosial merupakan kondisi alamiah manusia dan perangkat yang mengikat masyarakat secara bersama-sama (dalam Wirawan, 2012). Rasa peduli terhadap individu dan kelompok serta peduli terhadap program Pemerintah Desa Cidenok sebagai lingkungan bersama (sosial).perlu dikuatkan karena sikap peduli akan menghasilkan perubahan yang lebih baik bagi keberlangsungan hidup masyarakat Desa Cidenok.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, khususnya di Desa Cidenok, kami berinisiatif untuk membentuk Balai Konsultasi (Balkon) yang akan menjembatani aspirasi masyarakat Desa Cidenok dengan Pemerintah Desa Cidenok. Pembentukan Balkon diharapkan dapat menjadi sarana bagi masyarakat dan pemerintah desa untuk saling terhubung satu sama lain.

METODE

Penelitian pengabdian masyarakat ini menggunakan metode Asset-Based Community Development (ABCD). Metode ini dinilai sebagai pendekatan yang tepat bagi pemberdayaan masyarakat yang berlandaskan pada aset lokal yang terdapat di suatu wilayah. Aset tersebut dikembangkan agar dapat memecahkan masalah-masalah yang terdapat di wilayah lokasi pemberdayaan (Astawa, et al. 2022). Dengan metode ini diharapkan masyarakat dapat memaksimalkan potensi yang dimilikinya secara individu dan memanfaatkan aset yang dimiliki kelompok sosial seperti aset budaya, aset spiritual, aset fisik, dan lain sebagainya guna memajukan kelompok masyarakat.

Dalam pelaksanaannya digunakan pula teknik observasi dan simak, libat, cakap (SLC) untuk mendapatkan data dan fakta sosial yang muncul di masyarakat Desa Cidenok. Adapun tahapan pelaksanaannya yaitu: pertama inkulturasi, berupa pengenalan dengan pemerintah desa dan warga tiap blok Desa Cidenok. Kedua discovery, memetakan aset berupa manusia (warga) dan sarana prasarana yang dapat menunjang keberlangsungan program. Ketiga design, berupa perancangan program yang relevan dengan aset yang dimiliki Desa Cidenok. Keempat define, berupa pelaksanaan program serta umpan balik selama pelaksanaan. Dan kelima reflection, sebagai tolok ukur keberhasilan program sebagai bahan evaluasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya pembentukan Balai Konsultasi (Balkon) di tengah-tengah masyarakat Desa Cidenok diharapkan dapat memberikan solusi atas persoalan yang muncul antara masyarakat dengan pemerintah desa yang tidak dapat terselesaikan secara instan. Melalui kegiatan observasi selama kurang lebih 35 hari dan pendekatan dilakukan sebanyak 5 kali dalam seminggu mengikuti jadwal KNM (Kuliah Nyata Mahasiswa) dengan tujuan mampu menyelaraskan aspirasi atau kebutuhan sosial masyarakat dengan kemampuan dan aset yang disediakan oleh Pemerintah Desa Cidenok. Pembentukan Balai Konsultasi tidak secara langsung terjadi, tetapi melalui lima tahapan yang dirangkum menjadi tiga tahapan sebagai berikut.

1. Tahap Persiapan

Pada tahap awal kami melakukan persiapan yang terdiri dari persiapan satu dan persiapan dua. Tahap persiapan satu dimulai dengan diskusi antara mahasiswa dengan pemerintah desa. Mahasiswa mendata permasalahan sosial dari sudut pandang pemerintah desa terkait kondisi dan tanggapan masyarakat dalam setiap program pemerintah desa. Kemudian tahap persiapan dua, kami melakukan observasi dan wawancara tidak terstruktur yang dilaksanakan di tiap blok Desa Cidenok yaitu Blok Selasa, Blok Rabu, dan Blok Jumat selama 3 hari. Dilanjutkan Blok Senin, Blok Kamis, dan Blok Minggu selama 3 hari. Sasaran masyarakat yang didatangi bersifat random setelah mengunjungi Ketua RT dan Ketua RW terlebih dahulu. Kegiatannya berupa sapa warga serta bincang-bincang santai untuk mengulik permasalahan yang dialami masyarakat. Persiapan satu dan dua berjalan dengan lancar, karena pada saat observasi berlangsung masyarakat menyambut baik kedatangan mahasiswa.



Gambar 1.

Kegiatan sapa warga kepada ketua RT-RW.

Dengan mengamati respons masyarakat secara saksama mengenai kunjungan observasi dan wawancara, ditemukan beberapa keluhan seperti kondisi jalan, minimnya fasilitas umum, keterbukaan informasi, hingga bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Salah satu yang menyita perhatian adalah mengenai tidak meratanya pembagian bantuan sosial. Hal ini menurut Dharmakarja (2017) memperlihatkan lemahnya definisi, pemetaan, dan metodologi dalam menentukan kelompok miskin/rentan penerima program bansos. Dalam banyak kasus, program penyaluran bansos lebih berorientasi pada pencapaian *output* dan *outcome* ketimbang manfaat nyata (*beneficiary*) bagi kelompok sasaran. Maka dari itu, kami menindaklanjuti permasalahan hasil observasi dan wawancara di tahap persiapan untuk ditinjau dan diperhatikan pada tahap pelaksanaan. Sebelum pada tahap pelaksanaan, kami melakukan dengar pendapat dengan perwakilan tiap RT dan pemerintah desa untuk membentuk Balai Konsultasi (Balkon). Gagasan ini mendapat respons positif dari kedua belah pihak sebagai wadah aspirasi masyarakat yang hendak disalurkan kepada pemerintah desa. Dalam kesepakatannya, pemerintah desa menyediakan tempat berupa aset fisik yang dimiliki Desa Cidenok yakni berupa ruangan bekas isolasi warga yang terjangkit Covid-19 pada saat itu. Letaknya tepat bersebelahan dengan balai desa sehingga mudah dijangkau dan dapat dimonitoring secara berkala.

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan dimulai dengan peresmian Balai Konsultasi (Balkon) di minggu ke 2 kegiatan KNM (Kuliah Nyata Mahasiswa) STKIP Yasika di Desa Cidenok. Tahap pelaksanaan dibagi menjadi 3 sesi, yaitu sesi pertama peresmian Balkon oleh kepala desa dan ketua kelompok KNM. Sesi kedua disajikan alur penyampaian aspirasi: pertama, masyarakat dapat mendatangi Balkon baik secara individu maupun kelompok dengan cara mengisi buku kunjungan. Setelah itu masyarakat diberikan pemahaman dan tata cara untuk berkomunikasi (berpendapat) dengan baik dan santun tanpa dicampuri hal-hal yang dapat menimbulkan kegaduhan atau masalah baru. Setelah dipahami, kemudian barulah dimediasi oleh mahasiswa KNM dengan menghadirkan perwakilan dari pemerintah desa untuk bermusyawarah. Setelah itu dicatat poin-poin hasilnya dan tindak lanjut yang akan dilakukan pihak pemerintah desa atas dasar mufakat. Sesi ketiga refleksi berupa komitmen pemerintah desa, masyarakat, dan mahasiswa KNM untuk turut serta berperan dalam menjalankan fungsi Balkon secara berkelanjutan. Kegiatan ini dihadiri oleh Aparat Desa Cidenok, Ketua RT, RW dan tokoh masyarakat Desa Cidenok, masyarakat yang memiliki keluhan, usulan, kritikan terhadap permasalahan yang menyangkut pengelolaan desa serta masyarakat yang memiliki gagasan untuk kemajuan desa. Kegiatan pembentukan berlangsung ramai,

terutama ketika masuk pada sesi kedua yaitu paparan alur penyampaian aspirasi yang dilanjutkan dengan musyawarah. Balkon ini dibuka seminggu 5 kali menyesuaikan jadwal mahasiswa KNM.



Gambar 2.
Pelaksanaan perdana Balkon.

Berdasarkan hasil dari pelaksanaan perdana aktivitas Balkon, antusias dari masyarakat Desa Cidenok cukup tinggi. Hal ini terlihat ketika pelaksanaan dan diobservasi langsung, banyak warga yang menyampaikan permasalahan yang dirasa penting untuk ditingkatkan bersama. Selain itu, pada saat pelaksanaan kegiatan Balai Konsultasi (Balkon) dengan musyawarah bersama RT, RW, masyarakat, dan Pemerintah Desa Cidenok terlihat serius menyampaikan aspirasinya. Meskipun sebagian warga masih terlihat pasif saat diobservasi dan pada proses diskusi. Akan tetapi kegiatan berjalan lancar dengan terjalannya interaksi yang baik antara RT, RW, masyarakat dan Pemerintah Desa Cidenok. Hal ini menjadi awal terlaksananya salah satu program kerja KNM di Desa Cidenok melalui pembentukan Balai Konsultasi (Balkon) dengan harapan penguatan nilai musyawarah dan sosial demi kepentingan bersama memajukan desa.

Di sisi lain, terdapat pula beberapa faktor penghambat kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Pertama faktor internal, yaitu berkaitan dengan faktor pengetahuan dan pendidikan masyarakat yang masih rendah. Kedua, faktor pekerjaan masyarakat yang banyak menyita waktu dan membuat masyarakat belum maksimal terlibat dan berpartisipasi di Balkon. Sejalan dengan itu, Dapla, et. al. (2018) mengemukakan bahwa partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi di mana diupayakan antara lain perlunya perencanaan di bawah (*bottom-up*) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya. Dengan tersedianya wadah aspirasi melalui pelaksanaan musyawarah setelah pembentukan Balkon diharapkan kesadaran masyarakat akan partisipasi pembangunan desa dan pentingnya nilai musyawarah dan nilai sosial sebagai pengejawantahan sila ke 4 Pancasila di Desa Cidenok naik secara bertahap.

3. Tahap Monitoring dan Evaluasi

Kemudian tahap selanjutnya yaitu tahap monitoring. Pada tahap ini, kami melakukan monitoring dengan melihat sejauh mana aspirasi masyarakat yang telah masuk ditindaklanjuti. Monitoring selalu melibatkan pemerintah desa dalam diskusi yang dilakukan seminggu sekali sekaligus merencanakan langkah strategis penyelesaian yang nantinya dapat diketahui oleh masyarakat. Pada tahap ini juga kami memberikan penyuluhan mengenai pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawal jalannya pemerintahan desa. Di samping itu, kami menyosialisasikan fungsi Balkon kepada masyarakat yang belum mengetahui keberadaan Balkon serta mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan desa dengan berani menyampaikan keresahan-

keresahan atau usul yang bersifat membangun desa. Pada minggu keempat, melaksanakan evaluasi yang didasarkan pada hasil monitoring pelaksanaan Balkon selama 3 minggu, penyuluhan, dan sosialisasi (sapa warga). Pada tahap ini dilakukan peninjauan ulang dan perbaikan dalam sistematika kegiatan Balkon. Kemudian, kami mengadakan musyawarah dan kegiatan refleksi bersama masyarakat dan pemerintah desa secara keseluruhan. Pada akhir kegiatan KNM, kami sepakat membentuk petugas jaga Balkon yang terdiri dari pemerintah desa (BPD khususnya) dan wakil RT/RW agar Balkon tetap bisa terus berfungsi sebagaimana mestinya.



Gambar 3.

Kegiatan monitoring oleh tokoh masyarakat, pemerintah desa, dan dosen.

Dengan berbagai karakteristik yang dimiliki masyarakat Desa Cidenok dan gaya kepemimpinan Pemerintah Desa Cidenok, tidak menjadi hambatan sebuah desa untuk terus maju. Salah satu upaya dilakukan untuk penguatan nilai musyawarah dan nilai sosial melalui pembentukan Balai Konsultasi (Balkon). Dengan harapan supaya dapat meningkatkan pelayanan publik dan menyediakan wadah aspirasi masyarakat agar ditindaklanjuti dengan program pembangunan desa yang lebih kooperatif dan tepat guna.

KESIMPULAN

Kehidupan bermasyarakat yang ideal harus dilakukan dengan melibatkan kontribusi dari elemen masyarakat dan pemerintah desa untuk kepentingan lingkungan sekitar desa. Salah satu wujud kontribusi keduanya dapat ditingkatkan melalui penguatan nilai-nilai musyawarah dan sosial. Selanjutnya, perlu adanya sikap tegas agar setiap individu dapat memahami kondisi dan situasi, baik di dalam masyarakat maupun pemerintahan dalam rangka membangun kepedulian terhadap perkembangan Desa Cidenok. Dengan adanya Balai Konsultasi (Balkon) ini diharapkan masyarakat bisa lebih terbuka menyampaikan ide dan gagasannya dengan cara musyawarah dan bersosialisasi tentang problematika yang dihadapi untuk mendukung keberlangsungan hidup mereka di Desa Cidenok.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirulloh, M. 2020. Zoon Politicon Menjadi Zoom Politicon? *Jurnal Rechtvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1-5.
- Astawa, I.P.M., Pugra, I.W. and Suardani, M., 2022. Pemberdayaan Masyarakat Lanjut Usia dengan Pendekatan Asset Based Community Development (ABCD) di Dusun Kawan, Desa Bakas, Kabupaten Klungkung. *Bhakti Persada Jurnal Aplikasi IPTEKS*, 8(2), 108-116.
- Dapla, N., Gosal, R., dan Pangemanan, S. 2018. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Debula Kecamatan Kwelamdua Kabupaten Yahukimo) *EKSEKUTIF: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1(1).

- Darudin, M., 2022. Telaah Kritis Prinsip Prinsip Dasar Dalam Pemilihan Kepala Negara dan Musyawarah. *Jurnal Ilmiah Kutei*, 21(2).
- Dharmakarja, A.IGM. 2017. Rekonstruksi Belanja Bantuan Sosial. *Substansi*, 1(2), 374-389.
- Dhien, C.N., Nasrah, S. and Emilda, E., 2022. Analisis Nilai Sosial Dalam Novel Selamat Tinggal Karya Tere Liye. *DIAJAR: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 1(1), 95-99.
- Huri, A.D., Shafa, C.H., Sopyan, D.P., Andriansyah, D., Zahra, D.A., Herdiana, D. and Pelita, B.N., 2022. Kegiatan Sosialisasi Dan Musyawarah Di Berbagai Desa Sebagai Bentuk Aktualisasi Nilai Pancasila Sila Ke 4. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(5), 6275-6282.
- Rompas, W., Ruru, J.M. Kaehe, D. 2019. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kampung Pintareng Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(80).
- Rachaju, K., Hikmat, A. and Abdurrahman, M., 2022. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Fisik Desa. *Jurnal Soshum Insentif*, 5(2), 168-190.
- Surani, S. 2017. Revitalisasi Nilai-Nilai Musyawarah pada Mahasiswa UNS. Thesis. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
- Wirawan, I.B. 2012. *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*. Jakarta: Kencana Prenada group.